

RINGKASAN

Judul penelitian ini adalah Konflik Agraria Hak Kepemilikan Lahan *Government Ground* (GG) di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2016. Hal ini dilatarbelakangi karena memperebutkan status kepemilikan lahan (GG) seluas 32 bidang. Pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik agrarian ini adalah pihak BPN, Mantan Kepala Desa, dan masyarakat penggarap di Desa Cileuleuy. Pada perkembangannya, konflik tersebut menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Atas dasar itu, peneliti mengangkat rumusan masalah yakni, bagaimana konflik agraria kepemilikan lahan, serta akibat konflik kepemilikan lahan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Cileuleuy

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan pada penelitian adalah warga penggarap di Desa Cileuleuy, Kepala BPN Kuningan, Ketua Komisi 1 DPRD Kab Kuningan, mantan Kepala Desa Cieluleuy, dan tokoh masyarakat di Desa Cileuleuy. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif dan validasi data menggunakan triangulasi sumber. Artinya peneliti membandingkan informasi dari wawancara dengan sumber lain seperti observasi maupun dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik hak kepemilikan lahan yang terjadi di Desa Cileuleuy disebabkan karena terdapat perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan pertentangan dan saling klaim mengklaim di tataran masyarakat sehingga terjadilah konflik agraria. Kepentingan yang dibawa oleh masyarakat penggarap adanya alasan utama yang terkait kepentingan sosial ekonomi dikarenakan lahan GG merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kepentingan yang dibawa oleh BPN Kuningan merupakan kepentingan politik berupa kewenangannya, kewenangan yang dilkaskan oleh BPN terkait menghanguskan SK Bupati tahun 1985 yang menyatakan bahwa masyarakat penggarap memiliki hak milik bersertifikat atas tanah tersebut, dihanguskan karena masyarakat tidak dapat membayar kewajiban pembayaran kepada negara maka hal inilah sebagai pemicu konflik. Adapun upaya penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh DPRD Kuningan Komisi 1, hasilnya bahwa BPN menghanguskan SK sudah melalui prosedur dengan bukti yang ada dan masyarakat penggarap sudah tidak dapat lagi mengelola lahan tersebut dikarenakan akan dialihfungsikan lahannya oleh pemilik lahan tersebut. Pasca peralihan status lahan GG berakibat pada kehidupan sos-eko masyarakat penggarap. Pertama berubahnya struktur sos eko penggarap, kedua hilangnya sumber penghasilan penggarap, dan ketiga pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Konflik Agraria, *Government Ground*, Cileuleuy

SUMMARY

This research's purpose aims to describe agrarian conflict of Government Ground land rights in Cileuleuy Village, Cigugur District, Kuningan in 2016 and to describe the impacts of agrarian conflict against people in Cileuleuy Village on the socio-economic life. This research using qualitative method through case study approach. The data collecting method using in-depth interviews, observation, and documentation. The selection technique of informants using purposive sampling technique and snowball sampling. This study also uses interactive data analysis which are, data reduction, data presentation, and conclusion as a review of field notes.

The results of this study indicate that the agrarian conflict of Government Ground land rights in Cileuleuy Village is caused by the differences of interests that causing conflict and claiming between people itself. The interests which brought by the people of Cileuleuy Village are related to the socio-economic interests because this land is managed by the community for daily needs. Meanwhile, the interest which brought by Land Department of Kuningan is a political interest. By its authority, The Land Department of Kuningan did not acknowledge Regent's pact in 1985 which stating that Cileuleuy Village has the rights of certified ownership over the Government Ground land, be disenacted because they could not pay the obligation of payment to the government. Eventually, this issue trigger the agrarian conflict. As for efforts to resolve the conflict through mediation conducted by The Parlement of Kuningan Commission 1, the result is the pact that disenacted by The Land Department of Kuningan has been through correct procedure with existing evidence. Therefore, the farmers are no longer able to manage the land due to the land will be converted by the land owner. After the transition of Government Ground land status impacted in the socio-economic life of the farmers. First the change of the socio-economic structure, second the loss of income source of the farmers, and the fading of public trust to government.

Keywords: Agrarian Conflict, Government Ground, Cileuleuy